

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Depok: Raih Asa Sukses

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. (Edisi Kedua Cetakan Ketiga Belas 2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Erasmus A.T.Napitupulu, Estu Dyah Arifianti, Iftirahsari, Lovina, Maidina Rahmawati, Matchus Nathanel Siagian, Miko Susanto Ginting, M. Tanziel Aziezi, Sustira Dirga, Sri Bayuningsih Praptadina, 2022, *AUDIT KUHAP Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform

Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas. (Edisi Ketiga 2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.

Anggun Malinda, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta : Garudhawaca.

Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.

Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry., (Cetakan Kedua 2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta : UII Pres.

Bakhri, Syaiful. 2020, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Budhi, I Gusti Kade, 2021, *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*, Depok: Rajawali Press.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Husin, Kadri Husin dan Budi Rizki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden, Marpaung, 2011, *Proses Perkara Pidana Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2.

Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, buku ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Marwan Effendy, 2008, *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika.

Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana.

R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Sukabumi: Politeia Bogor.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Ridwan Eko Prasetyo. (Cetakan Pertama 2015). *Hukum Acara Pidana*. CV Pustaka Setia: Bandung.

Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.

Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa Keterpaduan atau Pergulatan*, Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tolib Effendi. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan. 2019. *Prapenuntutan dan Perkembangannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yulya Arisma, 2012, "Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Prapenuntutan" Laporan Penelitian, Universitas Sumatera Utara.

Zulkarnain. (Cetakan Ketiga 2016). *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

## Jurnal

- Afrialdo, M. 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh*. JOM Fakultas Hukum.
- Amrullah, M Arief. "Reformulasi Prapenuntutan Dalam KUHAP Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam KUHAP In-Constituendum." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (2024): 98–124. <https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-lahirnya-kuhap->.
- Aritonang, Parulian P. "Laporan Rekomendasi Kebijakan: Transformasi Sistem Penuntutan Dan Advocaat Generaal," November 2024.
- Azhar Nur, Muhammad, and Mustamin. "Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam RUU KUHAP." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 38–68. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Edited by Ibnu Fajar Rahim. Bogor: Guepedia, 2023.
- Budiman, Eren Arif, and Yulianus Pabassing. "Prapenuntutan Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 51–67. <https://doi.org/10.55551/jip.Vol>.
- Dwi Saputra, A.A. Gede, Tangun Susila, I Wayan, dan Made Suartha, I Dewa, 2013 "*Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan*." *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* Vol.1.
- Dokumen Jaksa Agung Nomor: R-24/A/SUJA/JA/04/2025 tertanggal 21 April 2025, "Masukan Kejaksaan atas Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana".
- Emirsya, Melfa, Joelman Subaidi, and Ferdy Saputra. "Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 8, no. 3 (August 2025). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>.
- Fani, Ryan, and Riza Zulfikar. "Pemeriksaan Tambahan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tersangka Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Mekanisme Prapenuntutan Sesuai Hukum Positif Di Negara Indonesia." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 25–34.
- Faulina Yekti, Fetty, and Emmilia Rusdiana. "Perlindungan Hukum Atas

- Hak Tersangka Terhadap Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Secara Berulang." *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2024): 96–106.
- Feiny Himpede, Ninni, Herlyanty YA Bawole, and Marchel R Maramis. "Kajian Hukum Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Praperadilan Di Indonesia." *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025). <http://binus.ac.id/>.
- Firmansyah, Alfajri. "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *JURISDICTIE* 2, no. 1 (2020): 55–80.
- Hasibuan, Khairuddin, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "RUU KUHAP: Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (July 30, 2024): 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurish.v3i2.6023>.
- Hendratmoko, Vito, and Wahyu Priyanka Nata Permana. "Implementasi Dan Relevansi Sistem Komando Dalam Doktrin Een En Ondeelbar Terhdap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 3, no. 3 (May 2025): 1–7.
- Hermawan, and Hendra Setyawan Theja. "Analisis Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 2022): 129–40. <https://elearning.uinsu.ac.id/course/info.php?id=1921>.
- Herwansah. "The Existence of the Prosecutor's Office in Implementing the Principle of a Single Prosecution System." *Ratio Legis Journal* 3, no. 1 (March 2024): 1019–27.
- Ibnu Fajar Rahim, Muh. "Asas-Asas Hukum Penuntutan." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (April 2023): 1.
- I Nyoman Agus Rana Wijaya, 2019, *Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi di Polres Kota Mataram)*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.
- Irfan F, Muh, Syamsuddin Muchtar, and Audyna Mayasari Muin. "Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System." *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 1 (June 2022): 1–14.
- Irwan, Muhammad, Surapto, Mulyani Zulaeha, and Achmad Faishal. "The Position Of The Prosecutor's Office As a Single Prosecutor In Indonesia's Criminal Justice System." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 5, no. 1 (April 2025): 38–45.

- Lukman, Bobby Ashari, Ruslan Renggong, and Basri Oner. "Pelaksanaan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone." *Clavia* 21, no. 1 (April 30, 2023): 35–45. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.2243>.
- Manullang, Nadya Lestari Tua. "Analisis Yuridis Tentang Prapenuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka." *JOM Fakultas Hukum*, no. 1 (February 2016): 1–15.
- Margono, Rudi, and Irsan Arief. *Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil Dan Materiel)*. Edited by Adi Al Fatah Wallad. 1st ed. Depok: Ikhlās Sukses Abadi, 2024.
- Markus, Freddy, 2017, *Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Penetapan Status Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2.
- Muhammad Fajar Rahim, 2023, *Asas-Asas Hukum Penuntutan, The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 1
- Makamea, Ronal, 2018, "Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik". *Lex Crimen* No. 5.
- Amrullah, M Arief. "Reformulasi Prapenuntutan Dalam KUHAP Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam KUHAP In-Constituendum." *PUSKAPSI Law Review* 4, no. 2 (2024): 98–124. <https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-lahirnya-kuhap->
- Aritonang, Parulian P. "Laporan Rekomendasi Kebijakan: Transformasi Sistem Penuntutan Dan Advocaat Generaal," November 2024.
- Azhar Nur, Muhammad, and Mustamin. "Kegagalan Asas Diferensiasi Fungsional: Transformasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan Asas Dominus Litis Dalam RUU KUHAP." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 38–68. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>.
- Banulita, Mia. *Asas Penuntutan Tunggal*. Edited by Ibnu Fajar Rahim. Bogor: Guepedia, 2023.
- Budiman, Eren Arif, and Yulianus Pabassing. "Prapenuntutan Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 51–67. <https://doi.org/10.55551/jip.Vol>.
- Emirsya, Melfa, Joelman Subaidi, and Ferdy Saputra. "Penerapan Asas Dominus Litis Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal*

- Pembangunan Hukum Indonesia* 8, no. 3 (August 2025).  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.136-153>.
- Fani, Ryan, and Riza Zulfikar. "Pemeriksaan Tambahan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tersangka Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Mekanisme Prapenuntutan Sesuai Hukum Positif Di Negara Indonesia." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2023): 25–34.
- Faulina Yekti, Fetty, and Emmilia Rusdiana. "Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Terhadap Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Secara Berulang." *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2024): 96–106.
- Feiny Himpede, Ninni, Herlyanty YA Bawole, and Marchel R Maramis. "Kajian Hukum Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Praperadilan Di Indonesia." *Lex Privatum-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 16, no. 1 (2025). <http://binus.ac.id/>.
- Firmansyah, Alfajri. "Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *JURISDICTIE* 2, no. 1 (2020): 55–80.
- Hasibuan, Khairuddin, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "RUU KUHAP: Tantangan Dan Harmonisasi Antara Asas Due Process of Law Dan Criminal Justice System Di Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 2 (July 30, 2024): 57–72. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>.
- Hendratmoko, Vito, and Wahyu Priyanka Nata Permana. "Implementasi Dan Relevansi Sistem Komando Dalam Doktrin Een En Ondeelbaar Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 3, no. 3 (May 2025): 1–7.
- Hermawan, and Hendra Setyawan Theja. "Analisis Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 2022): 129–40. <https://elearning.uinsu.ac.id/course/info.php?id=1921>.
- Herwansah. "The Existence of the Prosecutor's Office in Implementing the Principle of a Single Prosecution System." *Ratio Legis Journal* 3, no. 1 (March 2024): 1019–27.
- Ibnu Fajar Rahim, Muh. "Asas-Asas Hukum Penuntutan." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (April 2023): 1.
- Irfan F, Muh, Syamsuddin Muchtar, and Audyna Mayasari Muin. "Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System." *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 1 (June 2022): 1–14.

- Irwan, Muhammad, Surapto, Mulyani Zulaeha, and Achmad Faishal. "The Position Of The Prosecutor's Office As a Single Prosecutor In Indonesia's Criminal Justice System." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 5, no. 1 (April 2025): 38–45.
- Lukman, Bobby Ashari, Ruslan Renggong, and Basri Oner. "Pelaksanaan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Bone." *Clavia* 21, no. 1 (April 30, 2023): 35–45. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.2243>.
- Manullang, Nadya Lestari Tua. "Analisis Yuridis Tentang Prapenuntutan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka." *JOM Fakultas Hukum*, no. 1 (February 2016): 1–15.
- Margono, Rudi, and Irsan Arief. *Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil Dan Materiel)*. Edited by Adi Al Fatah Wallad. 1st ed. Depok: Ikhlās Sukses Abadi, 2024.
- . "Penyelesaian Problematika Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana (Hukum Pidana Formil Dan Materiel)." *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 9 (September 2025): 8751–64. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>.
- mh.uma.ac.id. "P-19 Dan P-21 Dalam Hukum Acara Pidana." mh.uma.ac.id, October 31, 2022. <https://mh.uma.ac.id/p-19-dan-p-21-dalam-hukum-acara-pidana/>.
- Muzer. "Jaksa Agung Tandatangani Naskah DIM RUU KUHP Untuk Sistem Hukum Acara Pidana Yang Adaptif ." badiklat.kejaksaan.go.id, June 23, 2025. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-tandatangani-naskah-dim-ruu-kuhp-untuk-sistem-hukum-fbbba>.
- Nasution, Rasina Padeni, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Kamilatunnisa Sitorus, and Ahmadil Chandra. "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (April 2024): 118–28.
- Noer, Priandhika Abadi. "Prespective and Implementative of The Basis of The Single Prosecution System of The Prosecution of The Prosecution Bill," n.d. <https://kejari-nabire.go.id/tugas-dan-fungsi-perdata-dan-tun/>.
- Pongoh, Ronaldo R, Johnny Lembong, and Tony Rompis. "Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KuhaP." *Lex Crimen* 9, no. 3 (July 2020): 180–87.
- Pratama, M. Ilham Wira. "Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 1 (April 20, 2023): 29–39.

<https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17568>.

- Pratidina, Ni Made Esthi Rahayu, and I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Akibat Hukum Ketidaklengkapan Berkas Penyelidikan Yang Dilakukan Tim Penyidik Dalam Proses Pra-Penuntutan Berdasarkan Perspektif Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (July 2025): 2–16. <https://doi.org/10.62281>.
- Rauf, Sofyan. "Model Ideal Pengembalian Berkas Perkara Pidana Berdasarkan Pendekatan Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi." *Pilar: Philosophia Law Review* 4, no. 1 (2024): 21–42. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3855>.
- Rozi, Raja Mohamad. "Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Revitalization of Pre Prosecution Institution to Support Legal Certainty and Justice in The Criminal Justice System in Indonesia)." *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 89–109.
- Rudy. "Proses Jaksa Peneliti Berkas Perkara Dalam Menentukan Tersangka Baru Pada Tindak Pidana Korupsi." *PAULUS Law Journal* 3, no. 2 (March 2022): 65–87.
- Sahbani, Agus. "Melihat Proses Prapenuntutan Di Kasus Rizieq Shihab." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-proses-prapenuntutan-di-kasus-rizieq-shihab-lt60150506403dd/?page=2), January 31, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-proses-prapenuntutan-di-kasus-rizieq-shihab-lt60150506403dd/?page=2>.
- Santoso, Topo, and Choky Risda Ramadhan. *Prapenuntutan Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Edited by Avida Avia. 1st ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Saptura, Trias, and Jatarda Mauli Hutagalung. "Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proses Of Law." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022): 1–16.
- Sembiring, Eddy Daullatta, and Erwin Susilo. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai Dalam Konteks Global Dan Analisis Konsep Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2024.
- Sihombing, Dedy Chandra, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (June 22, 2023): 63–75. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.
- Sipayung, Ronald Fredy Christian, and Alvi Syahrin. "Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah."

- Jurnal Hukum Kaidah* 23, no. 1 (2023): 26–40.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. “Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM.” *FITRAH* 1, no. 1 (January 2015): 35–46.
- Sofian, Ahmad. “Penguatan Kapasitas Jaksa Melalui Koordinasi Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam RUU KUHAP: Studi Perbandingan AS, Belanda Dan Indonesia.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 183–217. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Sudibyo, Andin Wisnu, and Ade Saptomo. “Problematisa Hukum Prapenuntutan Dalam Pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan Oleh Penuntut Umum Kepada Penyidik.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 234–45. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.421>.
- Supit, Angela A. “Prapenuntutan Dalam KUHAP Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” *Lex Crimen* 5, no. 1 (January 2016): 99–106.
- Suryadi, E. Agus, and H. Supardi. “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor).” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 2021): 1–25.
- Tarigan, Pristina Sari Ananda, Wessy Trisna, and Syarifah Lisa Andrianti. “Kejaksaan Dalam Pelaksana Prinsi Dominus Litis Pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Batam).” *Journal of Science and Social Research* 8, no. 3 (August 2025): 5217–23. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Tulak, Darmiati, Mulyati Pawennei, and Andika Prawira Buana. “Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, no. 4 (n.d.): 1947–60.
- Ubaidillah, Lutfian, Astrin Bernita Rahma, and Imam Arif Noval Andriansyah. “Diferensiasi Fungsional Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS).” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 23, no. 1 (May 2025): 1–8. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.956>.
- Wijaya, Lalu Teguh Atma, Joko Jumadi, and Suheflihusnaini Ashady. “Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law.” *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (February 2024): 136–50. <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>.

Yulya Arisma, 2012, "*Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Pra Penuntutan*" Laporan Penelitian, Universitas Sumatera Utara.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia